

**MATRIKS PROGRES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2025**

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)				
1.	RPP tentang Irigasi	Ditjen SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progsun Tahun 2022. 2. Permohonan penetapan ke Presiden melalui surat Menteri PUPR Nomor: HK.0101-Mb/81 tanggal 1 Februari 2024. 3. Adanya surat dari Menteri Pertanian yang ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Nomor: B-171/HK.130/M/09/2024 Hal Permohonan Penundaan Pengesahan atas RPP tentang Irigasi dan Rancangan Perpres tentang Perubahan atas Perpres 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. 4. Pengembalian RPP Irigasi dari Kementerian Sekretariat Negara ke Kementerian PU melalui Surat Menteri Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-609/M/D-1/HK.02.02/11/2024 tgl 20 November 2024. 5. Perlu penyelarasan substansi terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. pencetakan sawah dan jaringan irigasi tersier dengan Kementerian Pertanian. b. penyesuaian RPP Irigasi dengan program Kabinet Merah Putih. 	Direktorat Jenderal SDA perlu mengoordinasikan rapat pembahasan dengan Kementerian Pertanian.
2.	RPP tentang Sumber Air	Ditjen SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Progsun Tahun 2023. 2. Terbit surat selesai Harmonisasi dari Kementerian Hukum melalui surat Nomor: PPE.PP.03.03-4336 tanggal 30 Desember 2024 hal Penyampaian 	Perlu dikoordinasikan kembali dengan Kementerian Hukum terkait dengan

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
			<p>Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sumber Air.</p> <p>3. Telah dilakukan redaksional ulang pada bagian menimbang RPP Sumber Air sesuai arahan Pimpinan.</p>	<p>redaksional ulang pada bagian menimbang RPP Sumber Air pasca Surat Selesai Harmon</p>
3.	RPP tentang Jalan	Ditjen Bina Marga	<p>1. Izin Prakarsa Tahun 2022</p> <p>2. Penyampaian matrik tanggapan atas hasil rapat pembahasan RPP Jalan ke Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan surat Sekjen PU No Hk 0101-Sj/378 tanggal 3 Mei 2024 hal Penyampaian Matriks Tanggapan Atas Hasil Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Irigasi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan.</p> <p>3. Menunggu tindaklanjut dari Kementerian Sekretariat Negara atas surat Sekjen PU No Hk 0101-Sj/378 tanggal 3 Mei 2024 tersebut.</p>	<p>Koordinasi terakhir Biro Hukum dengan Perancang Ahli Madya Setneg tanggal 11 Agustus 2025, akan melaporkan kembali ke Pimpinan untuk minta arahan</p>
4.	RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum	Ditjen Cipta Karya	<p>1. Progsun Tahun 2021</p> <p>2. Pengembalian dari Setneg berdasar surat Mensesneg Nomor: B-553/M/D-1/HK.02.02/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, bahwa perlu dilakukan pengharmonisasian kembali terhadap penambahan substansi pasca Surat Selesai harmonisasi yakni terkait tarif tunggal air minum dan badan regulator air minum</p>	<p>Penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku pemrakarsa.</p>

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
5.	RPP tentang Rumah Negara	Ditjen Cipta Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan paraf dari Setneg ke Kementerian terkait sejak tahun 2020, namun Kementerian Keuangan belum membubuhkan paraf 2. Terdapat pengaduan proses rumah negara di Ombudsman dan telah ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Ombudsman, Setneg, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PU. 3. Telah disampaikan tambahan rumusan RPP Rumah Negara sebagai tindak lanjut rapat koordinasi untuk mengakomodir permasalahan pengaduan melalui surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn-554 tgl 6 Agustus 2025 Hal Rancangan Peraturan tentang Rumah Negara kepada Menteri Sekretariat Negara. 	Menunggu tindaklanjut dari Kementerian Sekretariat Negara
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN (RPERPRES)				
1.	RPerpres tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Borobudur	Ditjen Cipta Karya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembalian permohonan Izin Prakarsa dari Setneg melalui surat Mensesneg Nomor: B-255/M/D-1/HK.03.03/06/2025 tanggal 2 Juni 2025 hal Penyampaian Hasil Rapat Klarifikasi Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rperpres tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Borobudur, yang inti pengembalian antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Perlu dilakukan kajian kembali atas konsepsi Rperpres dengan mengacu pada dokumen perencanaan tata ruang b. Penyempurnaan naskah urgensi pertimbangan penyusunan RTBL Kawasan Borobudur 	

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
			sebagai RTBL Kawasan Strategis Nasional yang pertama kali ditetapkan 2. Disposisi Pak Menteri PU ke Dirjen Cipta Karya untuk dikoordinasikan dengan Kemenko IPK.	
2.	RPerpres tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Sekretariat Jenderal	1. Telah diterbitkan persetujuan Izin Prakarsa berdasarkan surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-392/M/D-1/HK.03.01/08/2025 tanggal 5 Agustus 2025; 2. Akan segera dibentuk Tim PAK; 3. Rapat Pembahasan PAK I pada tanggal 7 Agustus 2025. 4. Rapat Pembahasan internal PU tanggal 15 Agustus 2025 sebagai tindaklanjut masukan/tanggapan pada rapat PAK tgl 7 Agustus 2025	Direncanakan rapat PAK II pada tanggal 22 Agustus 2025
RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN (RKEPPRES)				
1.	RKeppres tentang Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I di Wilayah Sungai Bali-Penida, Wilayah Sungai Pompengan-Larona, Wilayah Sungai Saddang, dan Wilayah Sungai Parigi-Poso	Ditjen SDA	1. Penyampaian kembali Rkeppres kepada Menteri Sekretaris Negara berdasarkan surat Menteri PU Nomor: HK.0101-Mn-352 tgl 17 Juni 2025 2. Belum ada tindaklanjut dari Kementerian Sekretariat Negara	
RANCANGAN INSTRUKSI PRESIDEN (RINPRES)				
1.	RInpres tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ditjen Cipta Karya	1. Pengembalian dari Kementerian Sekretariat Negara ke Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Digabungkan menjadi substansi Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
				masih proses finalisasi di Kementerian Koordinator Bidang IPK
RANCANGAN PERATURAN MENTERI (RPERMEN) LUNCURAN TAHUN SEBELUMNYA				
1.	RPermen PU tentang Pedoman Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan dan Harga Dasar Air Permukaan	Ditjen SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prakarsa Tahun 2023. 2. Permohonan harmonisasi dikembalikan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-1810 tanggal 7 Agustus 2024, melalui surat tersebut Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa masih terdapat materi muatan yang memerlukan konsolidasi lanjutan dengan PT.PLN dan Kementerian ESDM. 	Direktorat Jenderal SDA perlu koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan terkait dengan substansi pembangkit listrik.
2.	RPermen PU tentang Pedoman Penerapan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air terkait Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.	Ditjen SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proleg Tahun 2024. 2. Pembahasan internal terakhir pada tanggal 16 Juni 2025. 	Direktorat Jenderal SDA akan melakukan percepatan rapat koordinasi dengan melibatkan Kementerian ESDM.
3.	RPermen PU tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proleg Tahun 2024. 2. Telah terbit Surat Selesai Pengharmonisasian di Oktober 2024 pada saat peralihan Kementerian PUPR menjadi Kementerian PU 3. Perlu penyempurnaan RPermen oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU selaku pemrakarsa dengan menghapus ketentuan substansi KPBU Perumahan dalam Rapermen dan penyesuaian 	Perlu dilakukan harmonisasi ulang

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
	Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur		substansi dengan Permen BAPPENAS Nomor 7 Tahun 2023. 4. RPermen sedang difinalisasi oleh Pemrakarsa.	
4.	RPermen PU tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol	Ditjen Bina Marga	1. Izin Prakarsa Tahun 2024. 2. Proses pengajuan tanda tangan surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PU kepada Direktur Jenderal Peraturan PUU, Kementerian Hukum	Penetapan di bulan Agustus 2025.
5.	RPermen PU tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ditjen Karya Cipta	1. Proleg PU tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 18/KPTS/M/2024 tanggal 12 Januari 2024. 2. Finalisasi substansi RPermen di Direktorat Sanitasi 3. Persiapan harmonisasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Pemrakarsa.	
6.	RPermen PU tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.	Ditjen Karya Cipta	1. Izin Prakarsa Tahun 2024 2. Finalisasi substansi RPermen di Direktorat Sanitasi 3. Persiapan harmonisasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selaku Pemrakarsa.	

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN IZIN PRAKARSA TAHUN 2025				
1.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pengambilalihan dan Pengoperasian Setelah Masa Konsesi Jalan Tol Berakhir	Ditjen Bina Marga	Persiapan Konsultasi Publik oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selaku pemrakarsa.	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/79 Tanggal 10 Februari 2025
2.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerja Umum	BPIW	Rapat pembahasan <i>draft</i> Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum oleh BPIW	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/125 Tanggal 17 Februari 2025
3.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol	Ditjen Bina Marga	<ol style="list-style-type: none"> 1. sudah dilaksanakan 2 (dua) kali FGD. 2. masih terdapat pending isu mengenai rumusan masalah sanksi dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). 3. Telah dilaksanakan FGD dengan ATI dan YLKI pada Juli 2025 4. Akan dijadwalkan rapat pembahasan lanjutan oleh Ditjen Bina Marga 	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/139 Tanggal 26 Februari 2025
4.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum	BKO	Sudah ditetapkan dan diundangkan Permen PU Nomor 1 Tahun 2025	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor Hk.0101-Mn/150 Tanggal 11 Maret 2025

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
5.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 225-2029	BPIW	Akan dilakukan rapat pembahasan terhadap <i>draft</i> Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025-2029.	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/266 Tanggal 30 April 2025
6.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum	Biro Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pembahasan dan Konsultasi Publik. 2. Rapat finalisasi untuk persiapan harmonisasi 	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/325 Tanggal 27 Mei 2025
3.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan pembahasan oleh Biro Hukum bersama dengan Bagian Hukum/Unit Teknis terkait. 2. Persiapan Konsultasi Publik 	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/344 Tanggal 11 Juni 2025
4.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU	Telah dilakukan beberapa kali pembahasan bersama BPJT, Direktorat Jenderal Bina Marga, Biro Hukum oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum selaku pemrakarsa.	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/354 Tanggal 20 Juni 2025
5.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Hukum	Telah dilakukan pembahasan dengan Unit Organisasi di Kementerian PU.	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/386 Tanggal 30 Juni 2025

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
6.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol Atas Prakarsa Badan Usaha	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU	Pembahasan internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur selaku pemrakarsa.	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/481 Tanggal 16 Juli 2025
7.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	BPIW	Pembahasan internal Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selaku pemrakarsa.	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/482 Tanggal 16 Juli 2025
8.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum	BKO	Telah dilakukan pembahasan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dengan melibatkan Biro Hukum dan Unit Organisasi di Kementerian PU	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/485 Tanggal 17 Juli 2025
9.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum	Biro PBMN	Telah dilakukan pembahasan Biro PBMN dengan melibatkan Biro Hukum dan Unit Organisasi di Kementerian PU	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/486 Tanggal 17 Juli 2025
10.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu	Biro Keuangan	Telah dilakukan pembahasan Biro Keuangan dengan melibatkan Biro Hukum dan Unit Organisasi di Kementerian PU	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/487 Tanggal 17 Juli 2025

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
11.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Layanan Advokasi Hukum	Biro Hukum	Telah dilakukan pembahasan Biro Hukum dengan melibatkan Biro Hukum dan Unit Organisasi di Kementerian PU	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/488 Tanggal 17 Juli 2025
12.	Rancangan Peraturan Menteri PU tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara dan Pejabat Lain	Biro Keuangan	Telah dilakukan pembahasan Biro Keuangan dengan melibatkan Biro Hukum dan Unit Organisasi di Kementerian PU	Izin Prakarsa Surat Menteri PU Nomor HK.0101-Mn/523 Tanggal 28 Juli 2025
RANCANGAN SURAT EDARAN				
1	Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Eks Direktorat Jenderal Perumahan Tahun Anggaran 2024 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Pembubuhan paraf tiap lembar pada Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum beserta Lampiran	-
2	Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penggunaan Akun dalam	Biro Keuangan	Penyampaian masukan dan koreksi terhadap Rancangan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Penggunaan Akun dalam Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran	-

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
	Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran			
3	Surat Edaran Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Telah dilakukan pembahasan bersama Direktorat BPB dengan Biro Hukum, untuk selanjutnya Rancangan Surat Edaran akan dibahas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri	Rancangan Surat Edaran Bersama terkait dengan Penyelenggaraan SBKBBG
4	Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air dan Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air	Direktorat Jenderal SDA	SE Menteri PU Nomor 10/SE/M/2025 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air Dan Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air	Telah ditetapkan tanggal 17 Juli 2025
RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI				
1	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pelimpahan Kewenangan Urusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Permohonan Paraf Persetujuan Kepada Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal, dan Menteri PU	-
2	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas Luar Negeri di Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Pembubuhan paraf tiap lembar pada Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum beserta Lampiran	-
3	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum	Biro Keuangan	Penyampaian masukan dan koreksi terhadap Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum	-

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
	tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa Satuan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara kementerian Pekerjaan Umum		Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa Satuan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara kementerian Pekerjaan Umum	
4	Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Pembubuhan paraf tiap lembar pada Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional	-
5	Penetapan Lokasi Pembangunan, Rehabilitasi, Atau Renovasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar Dan Menengah Di Bawah Kementerian Agama Tahap II Tahun Anggaran 2025-2026	Direktorat Jenderal Prasarana Strategis	Klarifikasi dengan Kementerian Keuangan (DJKN) terkait dengan serah terima barang milik negara, sambil menunggu arahan Bapak Menteri PU atas ND Direktur Jenderal Prasarana Strategis.	Dikembalikan ke Ditjen Prasarana Strategis.
6	Komite Keandalan Bangunan Gedung (KKBG)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Klarifikasi terkait dengan kriteria/kualifikasi penunjukan anggota Komite.	Dikembalikan ke Unor.
7	Komite Keandalan Bangunan Penyehatan Lingkungan (KKBP)	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Klarifikasi terkait dengan kriteria/kualifikasi penunjukan anggota Komite.	Dikembalikan ke Unor.
8	Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/M/2025 Tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Proses legislasi sekaligus menunggu kelengkapan dokumen pendukung berupa Surat Pernyataan dari Pemrakarsa bahwa terhadap pembatalan atau penambahan lokasi telah dilakukan verifikasi sebagaimana ditentukan dalam SE Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 19/SE/DC/2025, dan Surat	Menunggu kelengkapan dokumen pendukung.

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
	Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran 2025		Pernyataan Kebenaran substansi Rancangan Kepmen.	
9	Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 472/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lingkup Kegiatan dan Metode Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan Renovasi Sekolah Rakyat Tahap I Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Permohonan pengkajian ulang terkait dengan waktu proses penyusunan Rancangan Keputusan menyesuaikan dengan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Harga Satuan tanggal 12 Mei 2025.	Konsep Surat Pengembalian ke Unor Pemrakarsa.
10	Satuan Tugas Transformasi Penyediaan Air Baku, Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengolahan Air Limbah	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Dikirm ke Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk Pembubuhan paraf Pemrakarsa pada Naskah Rakepmen.	-
11	Mandat Sebagian Kewenangan Menteri PU selaku PJPK untuk KPBU SPAM Regional Jatiluhur I Dan Karian-Serpong	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Pembahasan bersama dengan Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur dan Biro Hukum.	-
12	Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum	Direktorat Jenderal Bina Kontruksi	Proses Penetapan Oleh Bapak Meteri Pekerjaan Umum	-
13	Panita Seleksi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	Direktorat Jenderal Bina Kontruksi	Proses Pembubuhan paraf perlembar dan Surat Pernyataan Kebenaran Substansi ke Direktorat Jenderal Bina Kontruksi	-

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
14	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Lokasi, Lingkup Kegiatan Dan Metode Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Optimalisasi Lahan Kementerian Pertanian Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mencapai Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal SDA	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 444/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi, Lingkup Kegiatan Dan Metode Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Optimalisasi Lahan Kementerian Pertanian Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mencapai Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Lokasi, Lingkup Kegiatan Dan Metode Pengadaan Barang Dan Jasa Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk Mendukung Optimalisasi Lahan Kementerian Pertanian Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Mencapai Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025
15	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal SDA	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 622/KPTS/M/2025 tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2025	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi dan Kelembagaan Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun Anggaran 2025
16	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Yamdena-Wetar	Direktorat Jenderal SDA	Permohonan Penetapan kepada Bapak Menteri berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 1165/ND/Sj/2025 tanggal 14 Agustus 2025 Hal Permohonan Penetapan Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Yamdena-Wetar	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
				Sumber Daya Air Wilayah Sungai Yamdena-Wetar
17	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Pembentukan Unit Pengelola Bendungan dan Pengangkatan Kepala Unit Pengelola Bendungan	Direktorat Jenderal SDA	Telah dimintakan paraf persetujuan ke Ditjen SDA sebagai pihak pemrakarsa melalui surat Plt. Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Nomor Hk0102-Sh/443 tanggal 14 Agustus 2025 Hal Permohonan Paraf pada Naskah Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Unit Pengelola Bendungan dan Penetapan Kepala Unit Pengelola Bendungan, bahwa secara substansi dalam Rkepmen tersebut sudah tidak ada permasalahan.	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Pembentukan Unit Pengelola Bendungan dan Pengangkatan Kepala Unit Pengelola Bendungan
18	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Lokasi dan Lingkup Kegiatan Percepatan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahap II Melalui Mekanisme Swakelola Tahun Anggaran 2025	Direktorat Jenderal SDA	Proses pengembalian ke Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Lokasi dan Lingkup Kegiatan Percepatan Pembangunan, Peningkatan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Untuk Mendukung Swasembada Pangan Tahap II Melalui Mekanisme Swakelola Tahun Anggaran 2025
19	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU	Proses pengembalian ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU	Rancangan Keputusan Menteri PU tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Untuk

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
	Usaha Dalam Pengusahaan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya			Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengusahaan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya
20	Rancangan Keputusan Menteri tentang Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Otomoni di Papua dan Papua Barat	Direktorat Jenderal Cipta Karya	Proses pembahasan	
RANCANGAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL				
1	Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penunjukan Koordinator Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Pada Wilayah Kerja Provinsi di Kementerian Pekerjaan Umum	Dewan Pengurus Korpri	Proses Upload dalam website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	-
2	Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan	Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	Penyusunan Salinan Sesuai Aslinya Rancangan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional	-

NO.	JUDUL	PEMRAKARSA	PROGRES	KETERANGAN
	Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat			
3	Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Pengembalian kepada Pemarkarsa untuk menindaklanjuti catatan Ibu Sekjen	Catatan Ibu Sekjen "Diskusikan dengan saya"
4	Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Pekerjaan Umum	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi	Proses Legal Drafting di Biro Hukum, untuk Proses Penetapan.	-
5	Rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Kementerian Pekerjaan Umum, Wisma Werdhapura di Jalan Danau Tamblingan Nomor 49, Sanur, Denpasar, Provinsi Bali	Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	Permohonan Paraf Persetujuan Kepada Kepala Biro Hukum, dan Sekretaris Jenderal.	-